



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Literatur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kudus

Amalia^{1✉}, Gisela Adio Ros Maria²

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ amalia.litbang@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Ekonomi Rakyat,

Kemiskinan, *Literature*

Review, Pemberdayaan,

RPJMD Kudus.

Abstrak

Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Kudus, sebagai wilayah dengan kontribusi ekonomi regional yang cukup signifikan di Jawa Tengah, masih menghadapi tantangan kemiskinan terutama di kalangan pelaku usaha mikro, buruh informal, dan masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam RPJMD 2025–2029 telah menetapkan *pemberdayaan ekonomi rakyat* sebagai misi utama untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah *literature review* sistematis terhadap sumber-sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam periode 2018 hingga 2024, serta dokumen kebijakan daerah terkait. Hasil kajian mengidentifikasi bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama: partisipasi masyarakat, akses pembiayaan inklusif, dukungan infrastruktur lokal, penguatan kelembagaan ekonomi mikro, serta adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Temuan literatur juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis data dalam pelaksanaan program, agar dampaknya dapat terukur secara sosial dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang terencana, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based*).

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural utama di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, infrastruktur ekonomi, dan layanan dasar (Puspita et al., 2024). Ketimpangan wilayah dan ketergantungan pada sektor informal menjadikan masyarakat pedesaan rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, maupun ekologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.

Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua strategi kunci yang diyakini mampu memutus rantai kemiskinan serta mendorong kesejahteraan jangka panjang (Hasan & Azis, 2018; Imam Indratno & Ina Helena Agustina, 2005). Dalam konteks daerah, ekonomi kreatif dan

industri berbasis lokal terbukti dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga serta menguatkan kemandirian masyarakat pedesaan (Puspita et al., 2024). Kemampuan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa, membentuk modal sosial maupun ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya menjadi fondasi penting dalam mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan (Imam Indratno & Ina Helena Agustina, 2005).

Faktor-faktor sosiodemografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, kesehatan, dan kepemilikan modal terbukti secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir yang memiliki tantangan tersendiri (Sembiring, 2018). Oleh karena itu, intervensi pemberdayaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidimensional yang memperhatikan karakteristik lokal secara komprehensif.

Untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Imam Indratno & Ina Helena Agustina, 2005; Puspita et al., 2024). RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029 telah menjadikan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai salah satu misi prioritas daerah, sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, kajian komprehensif berbasis literatur ilmiah yang mengelaborasi secara sistematis efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat dalam menanggulangi kemiskinan masih jarang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Pemberdayaan ekonomi rakyat telah menjadi elemen strategis dalam agenda pembangunan daerah, terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal (Djadjuli, 2018). Desentralisasi ini memungkinkan daerah untuk merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih adaptif, mencakup pengembangan fisik, penguatan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat (Djadjuli, 2018). Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi tidak hanya menjadi program teknis, tetapi juga bagian dari upaya transformasi struktural menuju kemandirian dan keadilan ekonomi.

Salah satu pendekatan konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program yang dijalankan oleh perangkat daerah terkait. Langkah-langkah seperti pembentukan sentra usaha, pelatihan sumber daya manusia, serta pendampingan usaha terbukti dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan keberdayaan pelaku usaha lokal (Fiddiniyah, 2021). Program pemberdayaan masyarakat desa juga berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, dengan memberikan akses dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan mencapai kemandirian ekonomi (Almasri, 2014).

Meskipun otonomi daerah memberikan ruang besar bagi inovasi kebijakan lokal, peran pemerintah pusat tetap relevan dalam membangun sinergi antarwilayah serta menyediakan kerangka kebijakan nasional yang mendukung pembangunan daerah (Raden Achmad Nur Rizki et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat sangat ditentukan oleh koordinasi lintas level pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan. Di Indonesia, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi secara kritis. Pendekatan *evidence-based policymaking* telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi pengurangan kemiskinan, namun penerapannya di tingkat lokal masih terbatas karena kendala anggaran, kapasitas teknis, dan koordinasi lintas sektor (Lentari, 2024). Oleh sebab itu, penting untuk meninjau literatur yang berfokus pada efektivitas kebijakan berbasis bukti dalam konteks lokal Indonesia.

Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan ekonomi, seperti mikrofinansial, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha kecil, memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada faktor kontekstual seperti budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pendampingan (Pahlevi & Suherty, 2023). Di sisi lain, pendekatan dari perspektif Islam mendorong pengentasan kemiskinan tidak hanya melalui

intervensi ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan solidaritas sosial melalui distribusi zakat, infaq, dan sedekah (Devita Sari et al., 2025).

Studi kasus Muhammadiyah di Lombok, misalnya, menunjukkan pendekatan holistik terhadap pengurangan kemiskinan melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, beasiswa, dan layanan kesehatan gratis, yang menunjukkan pentingnya integrasi dimensi sosial dalam pemberdayaan (Baykin & Widinarsih, 2022). Kajian literatur dan metode kualitatif sering digunakan dalam studi-studi pemberdayaan dan kemiskinan, dengan teori pemberdayaan dan pembangunan sosial sebagai kerangka konseptual utama.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus dalam RPJMD 2025–2029 menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai misi utama dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, kajian ilmiah berbasis literatur yang secara sistematis mengevaluasi relevansi dan efektivitas pendekatan pemberdayaan dalam konteks lokal Kudus masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mereview literatur yang relevan mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pengentasan kemiskinan, serta menganalisis bagaimana temuan-temuan tersebut dapat mendukung penguatan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis literatur yang relevan mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam konteks pembangunan daerah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap berbagai strategi pemberdayaan yang telah diterapkan di Indonesia dan negara berkembang lainnya, serta untuk mengevaluasi relevansinya terhadap arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029.

Data yang dianalisis berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit pada rentang tahun 2018–2024, serta dokumen kebijakan dan laporan resmi terkait program pemberdayaan ekonomi. Sumber data diperoleh dari database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, Scopus, dan DOAJ, dengan kata kunci pencarian: “pemberdayaan ekonomi rakyat”, “pengentasan kemiskinan”, “*evidence-based policymaking*”, “UMKM dan kemiskinan”, serta “*empowerment theory*”.

Kriteria inklusi meliputi (1) artikel yang membahas program atau strategi pemberdayaan ekonomi; studi yang menggunakan pendekatan teori pemberdayaan, pembangunan sosial, atau kebijakan berbasis bukti; (3) studi kontekstual di tingkat nasional maupun kabupaten/kota; dan (4) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi meliputi (1) artikel opini yang tidak melalui peer-review; dan (2) literatur dengan fokus di luar tema kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan, yakni melalui tiga tahapan, antara lain (1) identifikasi literatur melalui pencarian kata kunci; (2) seleksi berdasarkan abstrak dan kelayakan isi; dan (3) ekstraksi dan sintesis tematik berdasarkan fokus pembahasan, pendekatan teoritis, serta temuan utama. Hasil kajian kemudian dikelompokkan ke dalam tema besar yang relevan dengan konteks pembangunan daerah, yaitu: pendekatan berbasis komunitas, mikrofinansial, pelatihan dan pendampingan UMKM, serta integrasi nilai sosial keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Tematik Literatur

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam konteks ekonomi mikro dan program pembiayaan berbasis komunitas. Modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung sosial, tetapi juga menjadi mekanisme fungsional dalam memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti pembiayaan, pelatihan, dan jaringan usaha.

Penelitian oleh Novi Nurcahyani dan Renita Rahmawati (2023) mengungkapkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan dalam skema pemberdayaan ekonomi mikro syariah. Melalui unsur kepercayaan sosial dan jaringan komunitas, individu yang tergabung dalam kelompok dengan tingkat modal sosial tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan menjaga keberlanjutan program. Hal ini

menunjukkan bahwa kepercayaan dan kontrol sosial berbasis komunitas berkontribusi dalam membangun disiplin dan loyalitas ekonomi (Nurcahyani & Rahmawati, 2023).

Selanjutnya, studi oleh Perwira Hasibuan et al. (2025) menekankan pentingnya elemen-elemen modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma bersama, dan jaringan sosial (*social network*) dalam menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam program ekonomi syariah berbasis komunitas, modal sosial berperan memperkuat mekanisme informal seperti saling bantu, berbagi informasi pasar, dan kolaborasi antar pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya memperluas kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan ekonomi (Hasibuan et al., 2025). Khusus pada kelompok rentan seperti nelayan kecil di perkotaan, jaringan sosial menjadi tumpuan penting dalam mengakses pembiayaan, terutama saat akses terhadap lembaga keuangan formal sangat terbatas (Muhartono et al., 2023). Ketergantungan pada relasi sosial dalam bentuk paguyuban, koperasi lokal, atau lembaga keagamaan menunjukkan bahwa solidaritas sosial merupakan modal ekonomi yang nyata bagi masyarakat marjinal. Studi tersebut relevan untuk konteks Kabupaten Kudus, di mana sektor informal dan usaha mikro menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, A. Amalia (2015) menyatakan bahwa mobilisasi modal sosial lokal dalam bentuk arisan, kelompok usaha bersama, atau koperasi simpan pinjam dapat menjadi strategi potensial dalam menurunkan angka kemiskinan (Amalia, 2015). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada ketersediaan dana, tetapi juga pada keberlanjutan sosial program, di mana masyarakat saling mengawasi, mendukung, dan berbagi risiko secara kolektif. Oleh karena itu, penguatan modal sosial harus menjadi bagian dari desain program pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk dalam implementasi RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan kemudahan akses pembiayaan merupakan dua pilar utama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kedua aspek ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Studi oleh Sausan Raihana Putri Junaedi dan Rojali Rojali (2024) menggarisbawahi efektivitas pelatihan kewirausahaan berbasis digital dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pelaku usaha kreatif lokal. Pelatihan yang menyertakan elemen digitalisasi usaha, seperti pemasaran daring dan literasi teknologi, terbukti relevan bagi generasi wirausaha baru di sektor ekonomi kreatif. Dalam konteks Kudus, pendekatan ini berpotensi mendukung program digitalisasi UMKM yang telah mulai dirintis oleh pemerintah daerah (Junaedi & Rojali, 2024). Sementara itu, penelitian oleh M. Rochman et al. (2024) menyoroti dampak pelatihan kewirausahaan terhadap ibu-ibu PKK dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan mengembangkan produk rumah tangga yang bernilai tambah. Pelatihan semacam ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, sejalan dengan prinsip inklusi sosial dalam pembangunan daerah (Rochman et al., 2024).

Model pelatihan yang lebih inovatif juga dikaji oleh Z. Arifin (2019), yang mengembangkan pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) untuk usaha kecil pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan antara pemecahan masalah riil dan pengembangan pengetahuan praktis mampu mempercepat adaptasi pelaku usaha dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Strategi pelatihan ini sangat relevan diterapkan oleh dinas-dinas teknis di daerah yang menyasar kelompok usaha produktif di level dasar (Arifin, 2019).

Literatur lain menekankan pentingnya sinergi antara pelatihan dan akses pembiayaan. Menurut Bambang et al. (2023), integrasi pelatihan kewirausahaan dengan fasilitas pembiayaan menghasilkan efek pengungkit yang lebih besar terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, serta adopsi inovasi—khususnya di sektor pertanian dan agroindustri (Bambang et al., 2023). Dalam studi tersebut, pelaku usaha yang memperoleh akses simultan terhadap pelatihan dan pembiayaan mengalami peningkatan signifikan dalam volume usaha dan kualitas produk.

Namun demikian, tantangan struktural tetap menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Bambang et al. (2023) juga mencatat bahwa keterbatasan akses pasar, minimnya infrastruktur pendukung usaha, serta kurangnya jaringan distribusi menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi hasil pelatihan dan pembiayaan. Tanpa dukungan sistemik terhadap ekosistem usaha lokal, efek pemberdayaan cenderung stagnan atau tidak berkelanjutan (Bambang et al., 2023).

Literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks gender, terutama dalam menghadapi persoalan diskriminasi, akses yang timpang terhadap sumber daya, dan ketidaksetaraan partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan pemberdayaan berbasis gender berupaya untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan dan program pembangunan memberikan ruang yang adil bagi perempuan, khususnya dalam konteks masyarakat marginal seperti kelompok pesisir dan pelaku usaha informal.

Sutarto (2018) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan komunitas pesisir yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek partisipatif seperti *learning by doing*, pemecahan masalah secara kolektif, dan penguatan kapasitas individu melalui pembelajaran mandiri. Dalam komunitas semacam ini, perempuan sering kali memainkan peran domestik dan ekonomi secara bersamaan, namun akses mereka terhadap pelatihan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis gender tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformatif — mendorong perubahan dalam struktur sosial dan budaya (Sutarto, 2018).

Dari sisi perspektif keagamaan, Amelia (2023) menunjukkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berbasis prinsip-prinsip Islam dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan. Program tersebut selaras dengan nilai-nilai maslahah dan keadilan sosial yang mendasari tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu menjamin kesejahteraan dan keberdayaan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan. Ini menjadi relevan terutama di daerah seperti Kudus yang memiliki basis religius kuat dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam desain program ekonomi (Amelia, 2023).

Namun, tantangan struktural tetap ada. Kasim (2022) menyoroti bahwa diskriminasi berbasis gender masih berlangsung di banyak tempat kerja, baik dalam bentuk kesenjangan upah, beban kerja ganda, maupun representasi yang rendah di posisi strategis. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kebijakan, dan kewirausahaan (Kasim, 2022). Sa'i (2015) menawarkan serangkaian strategi untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi, antara lain: reinterpretasi teks-teks agama secara progresif, pengembangan kurikulum berbasis kesetaraan, penguatan peran perempuan dalam sektor informal dan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, edukasi politik, serta sosialisasi peraturan perundangan tentang perlindungan perempuan. Strategi-strategi ini penting untuk mengurangi disparitas gender secara sistemik dan menyeluruh (Mad Sa'i, 2015).

Temuan-temuan ini memberikan gambaran bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak bisa hanya bergantung pada satu intervensi kebijakan. Diperlukan pendekatan multiprogram yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, di mana pelatihan, pendampingan usaha, akses keuangan, dan penguatan pasar menjadi satu kesatuan strategi pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029, penguatan sinergi antar perangkat daerah, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari desain program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tabel 1. Temuan Tematik Literatur Terkait Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Tema Utama	Fokus Literatur	Referensi
Modal Sosial	Mendorong akses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan program.	Nurchayani & Rahmawati, 2023; Hasibuan et al., 2025; Muhartono et al., 2023; Amalia, 2015.
Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan keterampilan, daya saing, dan inovasi lokal.	Junaedi & Rojali, 2024; Rochman et al., 2024.
Integrasi Pelatihan dan Pembiayaan	Meningkatkan pertumbuhan usaha dan inovasi di sektor mikro	Arifin, 2019; Bambang et al., 2023;
Pemberdayaan Berbasis Gender	Penguatan peran perempuan dalam ekonomi lokal	Sutarto, 2018; Kasim, 2022; Mad Sa'i, 2015

Perspektif Keagamaan & Sosial	Mengintegrasikan nilai solidaritas dan keadilan sosial (zakat, infaq, dll.)	Amelia, 2023;
--	---	---------------

Sumber: Diolah dari narasi strategis RPJMD Kab. Kudus 2025-2029 dan telaah penulis, 2025.

Tabel 1 merangkum lima tema utama yang ditemukan dari hasil kajian literatur terkait pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks pengentasan kemiskinan. Tema pertama adalah modal sosial, yang berperan sebagai instrumen informal dalam memperkuat kepercayaan, kolaborasi, dan pengawasan sosial terhadap praktik ekonomi, terutama dalam skema pembiayaan mikro (Amalia, 2015; Nurcahyani & Rahmawati, 2023). Tema kedua berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan, yang secara konsisten terbukti mampu meningkatkan keterampilan, inovasi, serta partisipasi ekonomi kelompok marginal, seperti pelaku usaha mikro dan ibu rumah tangga (Junaedi & Rojali, 2024; Rochman et al., 2024).

Tema ketiga menunjukkan bahwa sinergi antara pelatihan dan pembiayaan memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan usaha dan penguatan kapasitas adaptif masyarakat ekonomi lokal (Bambang et al., 2023). Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan berbasis gender, terutama dalam mendorong perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi rumah tangga dan komunitas. Terakhir, muncul tema integrasi nilai sosial dan keagamaan, yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan spiritual dan solidaritas sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah sebagai mekanisme penguatan ekonomi berbasis nilai (Amelia, 2023; Sutarto, 2018).

2. Relevansi dengan RPJMD Kab. Kudus Tahun 2025-2029

Temuan-temuan utama dari kajian literatur yang telah disintesis sebelumnya menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029. RPJMD ini menetapkan enam misi pembangunan, salah satunya adalah *pemberdayaan ekonomi rakyat* sebagai strategi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sosial yang religius dan berbudaya turut memperkuat landasan institusional bagi praktik pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Tabel berikut menyajikan pemetaan antara temuan literatur dan misi RPJMD, serta menunjukkan relevansi strategis masing-masing temuan terhadap program yang sudah atau sedang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. Relevansi Temuan Literatur dengan Misi RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029

Temuan Literatur	Misi RPJMD Terkait	Program/Strategi Relevan dalam RPJMD
Pelatihan kewirausahaan berbasis lokal	Misi 1: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Pelatihan UMKM, BLK, pelatihan berbasis kelompok rentan
Integrasi akses pembiayaan dan pelatihan	Misi 1 & 6: Ekonomi Rakyat dan Tata Kelola Inovatif	KUR daerah, pendampingan usaha, digitalisasi keuangan
Penguatan modal sosial lokal	Misi 1 & 3: Ekonomi Rakyat & Budaya Berkarakter	Kelompok usaha, koperasi, penguatan kelembagaan lokal
Nilai sosial keagamaan dalam program	Misi 2: Kehidupan Sosial Religius & Berbudaya	Kolaborasi Baznas, pemberdayaan berbasis masjid/musala
Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan	Misi 4: Peningkatan Kualitas SDM dan Gender	Inklusi ibu rumah tangga dalam pelatihan dan usaha

Sumber: Diolah dari narasi strategis RPJMD Kab. Kudus 2025-2029 dan telaah penulis, 2025.

Tabel 2 menjelaskan keterkaitan antara temuan-temuan literatur dengan misi dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029. Misalnya, pelatihan kewirausahaan yang banyak dibahas dalam literatur memiliki relevansi langsung dengan Misi 1 RPJMD tentang

pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-program seperti pelatihan UMKM, pelatihan BLK, dan pengembangan wirausaha muda menjadi saluran kebijakan yang mendukung praktik-praktik tersebut.

Integrasi antara pelatihan dan pembiayaan yang terbukti efektif dalam literatur juga selaras dengan strategi Kudus dalam memperkuat akses pembiayaan lokal melalui KUR dan pinjaman mikro berbasis koperasi. Temuan lain mengenai penguatan modal sosial dan kelembagaan lokal berhubungan dengan program pembentukan kelompok usaha dan koperasi desa. Bahkan aspek nilai sosial-keagamaan yang dikaji dalam pendekatan literatur juga mendapat tempat dalam Misi 2 RPJMD, yang mendorong kehidupan sosial religius. Tabel ini menunjukkan bahwa secara garis besar, temuan ilmiah yang telah diidentifikasi memiliki kesesuaian tinggi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, dan berpotensi digunakan untuk memperkuat landasan *evidence-based policy* di Kudus.

3. Analisis Kritis

Meskipun sejumlah temuan literatur menunjukkan praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara teori dan praktik sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti fragmentasi kelembagaan, keterbatasan akses pasar, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan modal sosial dan nilai-nilai sosial keagamaan dalam desain program. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap gap implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap konteks lokal. Tabel berikut menyajikan beberapa isu utama yang ditemukan dalam literatur, disandingkan dengan kondisi implementasi di lapangan, serta rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Kudus.

Tabel 3. Analisis Kritis: Gap Implementasi dan Rekomendasi Strategis

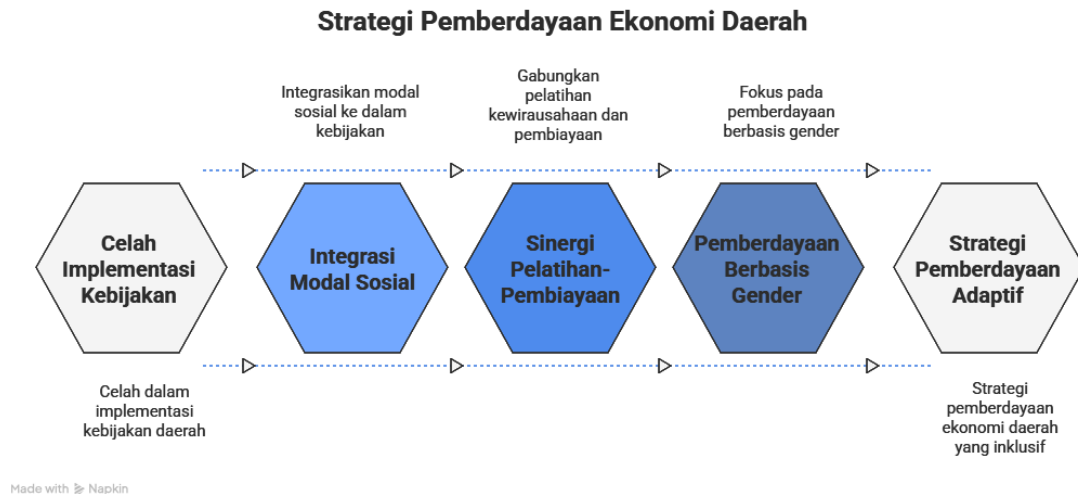
Isu atau Gap Implementasi	Temuan Literatur	Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah
Fragmentasi antar program dan OPD	Minim sinergi antara pelatihan dan pembiayaan	Integrasi lintas OPD melalui satu sistem koordinasi
Akses pasar yang terbatas	Hambatan distribusi produk pasca pelatihan	Penguatan ekosistem pemasaran lokal dan digital
Rendahnya literasi digital pelaku UMKM	Pelatihan digital belum merata di semua kelompok	Digitalisasi terstruktur dengan model inkubasi
Peran modal sosial belum dikelola secara aktif	Modal sosial alami belum difasilitasi secara kelembagaan	Institusionalisasi komunitas usaha (koperasi, BUMDes)
Pendekatan spiritual dan sosial belum terintegrasi	Peran zakat dan infaq hanya pada aspek amal sosial	Kolaborasi kelembagaan keagamaan dalam program ekonomi

Sumber: Diolah dari narasi strategis RPJMD Kab. Kudus 2025-2029 dan telaah penulis, 2025.

Tabel 3 menyajikan analisis kritis yang membandingkan antara temuan literatur dengan kondisi implementatif di daerah, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu isu utama adalah fragmentasi program antar-OPD, di mana pelatihan dan pembiayaan masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Literatur menekankan pentingnya integrasi lintas sektor agar dampak pemberdayaan lebih maksimal. Demikian pula, akses pasar yang terbatas menjadi tantangan dalam skema pengembangan usaha mikro; oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur distribusi dan platform digitalisasi yang mendukung perluasan jangkauan pasar lokal.

Isu lain yang muncul adalah rendahnya literasi digital, terutama di kalangan pelaku UMKM usia menengah ke atas. Pendekatan pelatihan yang adaptif dan disesuaikan dengan karakter peserta menjadi penting. Selain itu, peran modal sosial belum difasilitasi secara kelembagaan. Padahal, kelompok usaha informal berbasis kepercayaan sosial memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Terakhir,

nilai-nilai sosial dan keagamaan yang telah terbukti efektif dalam konteks pemberdayaan komunitas belum secara eksplisit diintegrasikan ke dalam program ekonomi daerah. Tabel ini menyarankan agar pendekatan holistik yang mencakup dimensi sosial, teknologi, dan kelembagaan menjadi dasar desain ulang kebijakan pemberdayaan ekonomi di Kudus.



Gambar 1. Diagram Alur Strategi Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, kajian ini menghasilkan beberapa temuan yang mengandung unsur kebaruan (novelty), baik dalam pendekatan konseptual maupun dalam relevansinya terhadap kebijakan daerah. Pertama, kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara modal sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam konteks kebijakan lokal, padahal unsur-unsur seperti kepercayaan, norma bersama, dan jaringan sosial terbukti memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas program pembiayaan mikro dan pengembangan usaha komunitas. Kedua, temuan mengenai sinergi antara pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan juga memperlihatkan pendekatan yang saling melengkapi, di mana dampak pemberdayaan ekonomi menjadi lebih optimal ketika kedua intervensi dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah. Ketiga, pendekatan pemberdayaan yang berbasis gender dan nilai-nilai religius memberikan kontribusi konseptual yang penting dalam memperluas definisi pemberdayaan ekonomi, dari yang semula bersifat teknis-instrumental menjadi transformatif dan holistik. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi ketimpangan ekonomi, tetapi juga diskriminasi sosial, khususnya terhadap perempuan dalam sektor informal. Keempat, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara praktik terbaik dalam literatur dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2029, namun juga menyoroti celah implementasi yang perlu dijawab dengan pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi multisektor. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi baru dalam mengaitkan dimensi sosial, religius, dan kelembagaan ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan inklusif.

SIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pendekatan strategis yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan, terutama ketika dirancang secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan religius. Temuan-temuan dari literature review ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh intervensi ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial, sinergi lintas sektor, serta sensitivitas terhadap isu gender dan keadilan sosial. Pendekatan yang menggabungkan pelatihan, pendampingan, pembiayaan, dan

penguatan nilai sosial-keagamaan terbukti mampu memperkuat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi otentik dengan menempatkan modal sosial sebagai variabel strategis yang selama ini sering terabaikan dalam desain kebijakan daerah. Temuan lainnya yang bersifat jangka panjang adalah pentingnya integrasi pendekatan transformatif dalam pemberdayaan ekonomi, yakni pendekatan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan agensi, partisipasi, dan hak-hak kelompok rentan, khususnya perempuan.

Dalam konteks Kabupaten Kudus, hasil kajian ini sangat relevan dengan arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029. Namun, terdapat celah antara desain kebijakan dan implementasi lapangan, yang dapat diatasi melalui pendekatan *evidence-based*, kolaborasi antar perangkat daerah, serta penguatan kapasitas komunitas. Oleh karena itu, rekomendasi dari studi ini dapat digunakan sebagai dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan, sekaligus menjadi rujukan jangka panjang dalam mengembangkan model pemberdayaan ekonomi rakyat yang adaptif terhadap dinamika lokal.

SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam kajian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kudus memperkuat integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengedepankan pendekatan holistik yang mencakup aspek pelatihan, pembiayaan, penguatan modal sosial, dan pemberdayaan berbasis nilai sosial-keagamaan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem koordinasi lintas perangkat daerah yang mampu menyinergikan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan, dan penguatan kelembagaan usaha komunitas agar tidak berjalan secara terfragmentasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya bersifat administratif dan seremonial, tetapi mampu menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan modal sosial perlu difasilitasi secara kelembagaan melalui pembentukan kelompok usaha berbasis komunitas, koperasi, dan BUMDes yang memiliki tata kelola inklusif dan partisipatif. Pemberdayaan berbasis gender juga harus diarusutamakan dalam setiap program, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, terutama di sektor informal dan rumah tangga, serta memberikan akses yang setara terhadap pelatihan dan sumber daya ekonomi.

Untuk mendukung keberlanjutan program, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based monitoring*) yang tidak hanya mengukur output, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Temuan dalam studi ini dapat dijadikan dasar dalam merancang roadmap pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Kudus, yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika lokal, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai model kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan visioner.

UCAPAN TERIMA KASIH (Opsional)

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas dukungan dan komitmennya dalam mendorong penelitian yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus yang telah memberikan akses terhadap dokumen perencanaan daerah serta masukan substantif yang sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Dukungan Bappeda menjadi bagian penting dalam mewujudkan kajian berbasis bukti yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, D. D. (2014). PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>

- Amalia, A. D. (2015). MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN. *Sosio Informa*, 1(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.166>
- Amelia, A.-. (2023). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i1.9182>
- Arifin, Z. (2019). PROGRAM TRAINING PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN BISNIS USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM). *SIGMA TEKNIKA*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.33373/sigma.v2i1.1809>
- Bambang, Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 142–155. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122>
- Baykin, M. D., & Widinarsih, D. (2022). KONSEP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DI PULAU LOMBOK NTB KAJIAN LITERATUR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3549>
- Devita Sari, Nindi Aulia, & Muhammad Rianto. (2025). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 1(3), 259–266. <https://doi.org/10.60145/jdss.v1i3.78>
- Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1).
- Fiddiniyah, A. F. (2021). PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI INDRAMAYU. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(1), 59. <https://doi.org/10.24235/orasi.v12i1.7634>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (4th ed.). CV Nur Lina.
- Hasibuan, P., Alfahrezi, Mhd. R., & Hasibuan, F. H. (2025). PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO BERBASIS SYARIAH. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.63736/jd.v3i1.552>
- Imam Indratno & Ina Helena Agustina. (2005). Studi Kemampuan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang). *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(3), 415–528.
- Junaedi, S. R. P., & Rojali, R. (2024). Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal melalui Pelatihan Kewirausahaan Digital di Komunitas Masyarakat. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.34306/adimas.v5i1.1132>
- Kasim, M. (2022). Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender oleh Prinsip-prinsip Keagamaan. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 271–278. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18514>
- Lentari, S. (2024). Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11648>
- Mad Sa'i. (2015). PENDIDIKAN ISLAM DAN GENDER. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 118–138. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.657>
- Muhartono, R., Sumarti, T., Saharuddin, S., & Koeshendrajana, S. (2023). Nelayan Kecil di Perkotaan: Karakteristik Usaha dan Jaringan Sosial dalam Mengakses Pembiayaan di Marunda, Jakarta Utara. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.11919>
- Nurchayani, N., & Rahmawati, R. (2023). ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL PADA TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN NASABAH BMT ITQAN CABANG PADASUKA. *Jurnal Financia*, 4(1), 44–54. <https://doi.org/10.51977/financia.v4i1.1013>
- Pahlevi, K., & Suherty, L. (2023). Mengkaji Dampak Keuangan Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi: Studi tentang Mikroentrepreneur di Negara-negara Berkembang dalam Pendekatan

- Bibliometrik. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 163–172. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.507>
- Puspita, P., Muthmainnah, M., Agustin, L. S., Yanti, V. J., & Syifa, A. W. (2024). PERAN EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN DI MASYARAKAT PEDESAAN INDONESIA. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 18(2), 345–355. <https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.52098>
- Raden Achmad Nur Rizki, Tri Setiady, & I Ketut Astawa. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.452>
- Rochman, M., Pardiman, P., & Anwar, B. (2024). Program Pemberdayaan Dengan Pelatihan Kewirausahaan Pada Ibu-Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). *Jurnal SOLMA*, 13(3), 2383–2390. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.15887>
- Sembiring, R. (2018). DAMPAK PERUBAHAN BUDAYA SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAHAN PADA MASYARAKAT DESA PAHLAWAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 3(1). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/204>
- Sutarto, D. (2018). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1473>